



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : APRILIA HENING PUSPITASARI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
3. NHK : 723909

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 970.000.000

1. Tanah Seluas 313 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp.  
90.000.000
3. Tanah Seluas 1450 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI  
Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 880 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp.  
90.000.000
5. Tanah Seluas 123 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 2243 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL  
SENDIRI Rp. 120.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 123.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000
3. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp.  
7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.098.000.000
III. HUTANG	Rp.	97.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.001.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.